1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Selama Triwulan III Tahun 2026, perkembangan inflasi di Kabupaten Mesuji menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun tetap berada dalam kisaran terkendali. Memasuki awal Triwulan III pada bulan Juli 2026, Kabupaten Mesuji mengalami deflasi sebesar -0,29 persen (month-to-month/m-to-m) dengan inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 2,81 persen dan year-to-date (y-to-d) sebesar 2,42 persen. Pada bulan Agustus 2026, tekanan inflasi meningkat dengan inflasi m-to-m sebesar 0,26 persen, inflasi y-on-y naik menjadi 3,50 persen, dan inflasi y-to-d mencapai 2,68 persen. Pada akhir Triwulan III (September 2026), Kabupaten Mesuji kembali mengalami deflasi m-to-m sebesar -0,22 persen, sementara inflasi y-on-y tercatat sebesar 3,71 persen (dengan Indeks Harga Konsumen/IHK sebesar 116,93) dan inflasi y-to-d sebesar 2,45 persen. Angka inflasi y-on-y September Kabupaten Mesuji (3,71 persen) ini relatif sepadan dengan daerah lain di Provinsi Lampung, seperti Kota Bandar Lampung (3,74 persen), Kota Metro (3,38 persen), dan Kabupaten Lampung Timur (3,00 persen).

   Tekanan inflasi selama Triwulan III dipengaruhi oleh beberapa kelompok pengeluaran. Pada September 2026, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatatkan inflasi tahunan tertinggi sebesar 11,84 persen, disusul oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,91 persen, kelompok transportasi sebesar 4,71 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,75 persen, kelompok kesehatan sebesar 2,41 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,71 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,65 persen, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,02 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,00 persen. Sementara itu, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami deflasi sebesar -0,54 persen.

   Berdasarkan komoditas, penyumbang utama andil inflasi year-on-year pada September 2026 didominasi oleh beras (+0,36 persen), kacang panjang (+0,34 persen), dan Sigaret Kretek Mesin (+0,18 persen). Di sisi lain, komoditas utama yang memberikan andil deflasi bulanan (m-to-m) pada akhir Triwulan III adalah bawang merah (-0,19 persen), bawang putih (-0,17 persen), terong (-0,08 persen), dan tomat (-0,04 persen). Memasuki pertengahan Oktober 2026, hasil pemantauan harian menunjukkan pergerakan fluktuasi harga pada 9 komoditas utama di Pasar Simpang Pematang, di mana kenaikan harga signifikan terjadi pada kelompok hortikultura seperti cabai rawit merah (mencapai Rp80.000/kg), cabai merah besar (Rp55.000/kg), cabai rawit hijau (Rp45.000/kg), dan bawang bombay (Rp30.000/kg) akibat kenaikan harga dari tingkat pengampas/pemasok luar daerah. Sementara komoditas seperti daging ayam ras (Rp38.000/kg), telur ayam ras (Rp24.000/kg), tomat (Rp6.000/kg), dan ketimun (Rp6.000/kg) menunjukkan kecenderungan penurunan harga.

   Ke depan, risiko inflasi diperkirakan masih berasal dari ketergantungan pasokan komoditas hortikultura dari luar daerah (pengampas), faktor perubahan cuaca yang dapat mengganggu hasil produksi lokal maupun sentra pemasok, dinamika harga pangan strategis nasional, serta potensi peningkatan permintaan masyarakat menjelang akhir tahun. Oleh karena itu, konsistensi program stabilisasi pasokan dan pemantauan distribusi tetap menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas inflasi daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan pemantauan lapangan, ditemukan beberapa kendala utama:

1. Tingginya volatilitas harga komoditas hortikultura (khususnya cabai merah besar, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau) yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim dan musim produksi.
2. Ketergantungan pedagang eceran di pasar utama (seperti Pasar Simpang Pematang) terhadap pasokan pengampas dari luar Kabupaten Mesuji sehingga harga jual lokal sangat rentan terhadap kenaikan harga di tingkat pemasok.
3. Terbatasnya kapasitas pasokan hortikultura lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik secara mandiri.
4. Tantangan geografis dan kelancaran rantai distribusi bahan pokok yang memerlukan pemeliharaan infrastruktur jalan pendukung secara berkelanjutan.
5. Perlunya optimalisasi penyerapan realisasi anggaran penanganan inflasi OPD untuk mendukung efektivitas intervensi harga dan pasokan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

TPID telah melaksanakan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif):

1. Keterjangkauan Harga:

- Melakukan Pemantauan Harga Bahan Pokok Dan Penting di 5 Pasar 5 Kecamatan Kemudian Merilis Harga Bahan Pokok dan Harga Komoditas Utama setiap minggu di Web Resmi Pemda Kabupaten Mesuji, Intagram, Facebook dan Status WA.
- Melakukan Pemantauan Harga bahan pokok dan penting setiap hari Kerja di Pasar Simpang Pematang dan dilaporkan di program SP2KP milik Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.
- Melaksanakan GERAKAN SERENTAK PENITRASI PASAR dalam Rangka Pengendalian Inflasi Di 15 Kabupaten Kota se Provinsi Lampung Komoditas M B G (Minyak goreng, Gula Pasir dan Beras), 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 dan 28 Juli 2026 di Pasar Rakyat Simpang Pematang, Pasar Adiluhur, Pasar Gedung Ram dan Pasar Brabasan. 05, 07, 10, 12, 19, 21, 24 dan 26 Agustus 2026 di Pasar Rakyat Simpang Pematang, Pasar Wiralaga I, Pasar Bukoposo, Pasar Panca Warna dan Pasar Fajar Baru. 01, 04, 07, 10, 14, 16, 21 dan 28 September 2026 di Pasar Rakyat Simpang Pematang, Pasar Adi Luhur, Pasar Brabasan dan Pasar Margo Jaya.
- Melaksanakan Sidak Pasar guna untuk menjaga kestabilan Stok dan Harga Sembako di Pasar Simpang Pematang, 10 September 2026 di Pasar Simpang Pematang.

2. Ketersediaan Pasokan:

- Memonitor pelaksanaan distribusi bantuan pangan alokasi Juli–September 2026 yang disalurkan pada bulan September 2026 di 7 kecamatan (Rawajitu Utara, Mesuji Timur, Way Serdang, Tanjung Raya, Mesuji, Panca Jaya, dan Simpang Pematang).

3. Kelancaran Distribusi:

- Melaksanakan pengawasan dan koordinasi kelancaran arus distribusi logistik dan transportasi bahan pokok bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Mesuji, dan Satpol PP.

4. Komunikasi yang efektif:
    - Mengikuti Rapat Koordinasi Rutin Pengendalian Inflasi Nasional secara virtual melalui Zoom Meeting yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI setiap minggunya.
    - Melaksanakan Rapat Koordinasi Penguatan Petani Cabai dan Bawang Merah Kabupaten Mesuji pada 13 Oktober 2026 di Kecamatan Tanjung Raya sebagai langkah penguatan kelembagaan tani.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    Secara umum, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Mesuji selama Triwulan III Tahun 2026 berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh terjadinya deflasi pada bulan Juli (-0,29 persen) dan September (-0,22 persen) yang mampu menahan laju inflasi tahunan (y-on-y) tetap berada pada tingkat 3,71 persen dan year-to-date pada angka 2,45 persen.

    Intervensi melalui Penetrasi Pasar Murah komoditas beras SPHP, minyak goreng, dan gula pasir terbukti efektif dalam menjaga daya beli masyarakat dan menekan gejolak harga pangan pokok. Di samping itu, realisasi anggaran penanganan inflasi daerah hingga Agustus 2026 telah terealisasi sebesar Rp13,67 miliar dari total anggaran Rp33,59 miliar (40,72 persen), dengan porsi penyerapan terbesar pada program Keterjangkauan Harga. Kendati demikian, pengendalian harga komoditas hortikultura segar masih dihadapkan pada ketergantungan pasokan luar daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas produksi petani lokal dan percepatan penyerapan anggaran pada Triwulan IV menjadi fokus evaluasi mendatang.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    - Memperkuat dan melanjutkan pemantauan harga harian melalui SP2KP pada komoditas gejolak harga (volatile foods) seperti cabai dan bawang.
    - Merealisasikan tindak lanjut Rapat Koordinasi Penguatan Petani Cabai dan Bawang Merah melalui pemberian sarana produksi, bibit, dan pendampingan teknis guna meningkatkan kapasitas produksi hortikultura lokal.
    - Menginisiasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan kabupaten/kota produsen hortikultura untuk menjamin kepastian pasokan dari pengampas/pemasok utama.
    - Mendorong percepatan penyerapan anggaran penanganan inflasi pada seluruh OPD terkait untuk mengoptimalkan intervensi pengendalian inflasi di Triwulan IV.
    - Melanjutkan kegiatan Penetrasi Pasar/Pasar Murah secara berkala di wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kenaikan harga pangan.
    - Memperkuat komunikasi publik mengenai ketersediaan stok pangan pokok guna menjaga ekspektasi harga di tingkat pedagang maupun masyarakat.